

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juni 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 0,19% (mtm) namun lebih rendah dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,36% (mtm). Realisasi inflasi Kalimantan Selatan juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,32%. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,25% (yoy).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar penyumbang inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring kenaikan harga bawang merah sejalan dengan adanya gagal panen di sentra produksi Bima, NTB akibat banjir. Lebih lanjut, ikan gabus dan tomat mengalami inflasi seiring penurunan hasil tangkap dan panen akibat curah hujan yang masih tinggi.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Juni 2025, kota dengan inflasi tertinggi terjadi di Hulu Sungai Tengah sebesar 0,38% (mtm), diikuti oleh Tanah Laut sebesar 0,25% (mtm), Banjarmasin sebesar 0,23% (mtm), Kotabaru sebesar 0,11% (mtm), dan Tanjung sebesar 0,08% (mtm).

Mencermati perkembangan terkini, tekanan inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Juli 2025 diperkirakan lebih rendah dari bulan sebelumnya. Perlambatan seiring tekanan inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan menurun seiring melandainya harga emas global sejalan dengan meredanya perang di wilayah Timur Tengah. Tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan melambat seiring dimulainya periode panen bawang merah di sentra produksi (Jateng) serta peningkatan hasil tangkap aneka ikan dan produksi hortikultura sejalan dengan perkiraan semakin menurunnya curah hujan. Sementara itu, aneka rokok diperkirakan meningkat seiring transmisi penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE). Di sisi lain, tekanan kelompok transportasi diperkirakan meningkat disebabkan oleh kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi (pertamax) sejalan dengan meningkatnya harga minyak global. Tekanan inflasi kelompok transportasi tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara seiring normalisasi permintaan pasca HBKN Idul Adha 1446H dan periode *long weekend* serta berlanjutnya diskon PPNDTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) sebesar 6%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan April 2025**

Pada April 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 1,08% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 1,17% (mtm) namun lebih tinggi dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,88% (mtm). Adapun realisasi inflasi Kalsel juga lebih rendah dibandingkan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,59%. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,20% (yoy).

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi kelompok dengan andil terbesar penyumbang inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring dengan normalisasi kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya listrik 2200 VA ke bawah.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi namun masih berada dalam rentang target inflasi nasional. Pada April 2025, kota dengan inflasi tertinggi terjadi di Banjarmasin sebesar 1,35% (mtm), diikuti oleh Tanjung sebesar 1,28% (mtm), Hulu Sungai Tengah sebesar 1,06% (mtm), Kotabaru sebesar 0,89% (mtm), dan Tanah Laut sebesar 0,24% (mtm).

◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Mei 2025**

Pada Mei 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi deflasi nasional sebesar 0,37% (mtm) serta deflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,36% (mtm). Adapun realisasi deflasi Kalsel juga menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,08%. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,57% (yoy).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar penyumbang deflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring penurunan harga komoditas aneka ikan (gabus, papuyu) disebabkan oleh peningkatan hasil tangkapan seiring curah hujan yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian harga daging ayam ras juga mengalami perlambatan seiring biaya input jagung dan DOC yang menurun. Komoditas cabai rawit dan bawang merah mengalami deflasi sejalan dengan membaiknya pasokan seiring panen di sentra produksi di wilayah Jawa.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi. Pada Mei 2025, kota dengan deflasi terdalam terjadi di Hulu Sungai Tengah sebesar 1,20% (mtm), diikuti oleh Tanah Laut sebesar 0,81% (mtm), Tanjung sebesar 0,48% (mtm), Kotabaru sebesar 0,12% (mtm), dan Banjarmasin sebesar 0,01% (mtm).

◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Juni 2025**

Pada Juni 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 0,19% (mtm) namun lebih rendah dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,36% (mtm). Realisasi inflasi Kalimantan Selatan juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,32%. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,25% (yoy).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar penyumbang inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring kenaikan harga bawang merah sejalan dengan adanya gagal panen di sentra produksi Bima, NTB akibat banjir. Lebih lanjut, ikan gabus dan tomat mengalami inflasi seiring penurunan hasil tangkapan dan panen akibat curah hujan yang masih tinggi.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Juni 2025, kota dengan inflasi tertinggi terjadi di Hulu Sungai Tengah sebesar 0,38% (mtm), diikuti oleh Tanah Laut sebesar 0,25% (mtm), Banjarmasin sebesar 0,23% (mtm), Kotabaru sebesar 0,11% (mtm), dan Tanjung sebesar 0,08% (mtm).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ Periode April 2025

Dalam rangka upaya pengendalian inflasi secara berkelanjutan khususnya sebagai upaya antisipasi kenaikan harga bahan pokok pasca HBKN Idul Fitri oleh TPID se-Kalimantan Selatan selama bulan April 2025 telah melaksanakan langkah sebagai berikut:

◦ **Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga**

1. Satgas Pangan Kalimantan Selatan telah melakukan sidak pasar di Pasar Centra Antasari Banjarmasin pada Jumat, 18 April 2025, untuk memantau harga pangan pasca-Lebaran.
2. Melaksanakan operasi pasar/pasar murah/ GPM di Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Tapin menjelang hari buruh yang merupakan kolaborasi berbagai SKPD dengan pihak swasta dan BUMN.
3. Gerakan Pangan Murah di Banjarbaru: Pemprov Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel juga melaksanakan GPM di Banjarbaru pada Selasa, 08 April 2025 yang bertempat di samping Gedung Sarabakawa Tanjung Kab. Tabalong dan Jumat, 25 April 2025. GPM ini menawarkan sembilan bahan pokok pangan dengan harga di bawah pasar, bahkan beberapa sayuran diberikan gratis.
4. Polda Kalsel bekerja sama dengan Forkopimda menggelar pasar murah di Lapangan Mapolresta Banjarmasin pada Senin, 28 April 2025, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Acara ini menyediakan 1000 sembako dengan harga terjangkau.
5. Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai kabupaten/kota di Kalsel, secara rutin melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan modern. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar.

◦ **Upaya Kelancaran Distribusi**

Launching kajian BUMD pangan dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi dari hulu-hilir untuk komoditas pangan strategis.

◦ **Upaya Ketersediaan Pasokan**

Panen padi apung di Kab. HSS sebesar 6 ton gabah yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, OJK, Bank Kalsel, dan DPKP HSS sebagai inovasi dan alternatif media tanam. Selain itu, terdapat pelaksanaan pelatihan budidaya bawang merah *true shallot seed* pada 29 April 2025 di Kab. Tabalong sebagai alternatif metode pembenihan bawang merah yang lebih efisien.

◦ **Upaya Komunikasi Efektif**

Pelaksanaan *Roadshow* TPID se-Kalsel dalam rangka kolaborasi TPID dan GNPIP serta penyusunan *Roadmap* TPID 2025-2027.

◦ Periode Mei 2025

Upaya pengendalian inflasi oleh TPID se-Kalimantan Selatan selama bulan Mei 2025 sebagai berikut:

- **Upaya Keterjangkauan Harga**

Telah dilaksanakan operasi pasar/pasar murah/ GPM di Kota Banjarmasin, Kab. HST, Kab. Tapin menjelang Idul Adha 1446H untuk komoditas seperti beras, aneka cabai, minyak goreng, aneka ikan, dll.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) daerah pada bulan Mei dilaksanakan di beberapa daerah diantaranya :

- Desa pelanjau Kec. Batumandi Kab Balangan pada tanggal 06 Mei 2025
- Halaman Kantor Camat Padang Batung Kec. Padang Batung Kab. HSS pada tanggal 07 Mei 2025
- Banjarbaru pada tanggal 16,23 dan 30 Mei 2025

- **Upaya Kelancaran Distribusi**

Kelancaran distribusi dilakukan melalui prioritisasi angkutan pangan di daerah dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.

- **Upaya Ketersediaan Pasokan**

Panen padi apung di Kab. HSS dan HSU sebagai inovasi dan alternatif media tanam. Kemudian, telah dilakukan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) oleh Bulog dengan membentuk Tim Jemput Gabah di seluruh wilayah Kalimantan Selatan guna menjamin kecukupan pasokan.

- **Upaya Komunikasi Efektif**

Telah dilaksanakan *Capacity Building* dalam rangka Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) TPID 2025-2027 se Kalimantan Selatan untuk memastikan program TPID Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota ke depan dapat mengatasi permasalahan struktural dan memitigasi potensi risiko inflasi ke depan. Selain itu juga dilakukan monitoring TPID Provinsi Kalimantan Selatan ke Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah.

- Periode Juni 2025

Upaya pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara koordinatif oleh TPID Prov. Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten/Kota selama bulan Juni 2025 sebagai berikut:

- **Upaya Keterjangkauan Harga**

- Pasar Murah di Balangan: Disperindag Kabupaten Balangan mengadakan pasar murah pada 1 Juli 2025 untuk mengendalikan inflasi.
- Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) menggelar program Pasar Murah di 52 kelurahan secara bergilir, dimulai pada Selasa, 3 Juni 2025 di Kelurahan Sungai Andai, dan akan berlangsung hingga 25 Juli 2025. Ini adalah program ekstensif untuk menekan inflasi.

Telah dilaksanakan pasar murah di Kota Banjarmasin, Kab. Hulu Sungai Tengah, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Mapolres Barito Kuala tanggal 04 Juni 2025 dalam rangka Idul Adha 1446H untuk komoditas strategis seperti beras, aneka cabai, minyak goreng, aneka ikan, dll.

- Pasar Murah di Hulu Sungai Tengah (HST) untuk memeriahkan Hari Bhayangkara ke-79 pada Senin, 30 Juni 2025, di halaman Polres Hulu Sungai Tengah. Selain itu, kegiatan pasar murah bersama PPDI pada Senin, 23 Juni 2025, untuk mendorong stabilitas ekonomi. Polres HST juga mengadakan pasar murah LPG 3 kg pada Selasa, 17 Juni 2025.
- **Upaya Ketersediaan Pasokan**
- Perluasan pupuk batubara pada demplot komoditas padi dan jagung di Kab. Tanah Laut. Kemudian, telah dilaksanakan program pemberdayaan petani milenial se-Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas petani secara *end to end*.
- Melaksanakan panen raya jagung di lahan rawa seluas 7,8 hektar, dengan hasil mencapai lebih dari 41 ton. Panen ini merupakan bagian dari gerakan panen serentak nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan menjadi bukti nyata bahwa lahan rawa dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan. Hasil panen ini menunjukkan produktivitas mencapai 5,38 ton per hektare. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dari Polda Kalsel selaku penginisiasi program, Pemprov Kalsel, Bulog Kalsel, dan akademisi serta stakeholder terkait. Keberhasilan panen ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak di Kalimantan Selatan, serta memberikan dampak positif pada harga telur dan daging ayam.
- **Upaya Kelancaran Distribusi**

Dalam rangka kelancaran distribusi angkutan di darat dan pelabuhan, Dinas Perhubungan melakukan prioritas angkutan untuk bahan pokok pangan. Selain itu juga direncanakan untuk pemberian subsidi ongkos angkut dan masih dalam tahap penghimpunan data serta koordinasi dengan dinas terkait.

- **Upaya Komunikasi Efektif**

Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut sinkronisasi penyusunan Roadmap TPID Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2027 sesuai dengan Program Prioritas Daerah dan Visi Misi Kalimantan Selatan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Provinsi Kalimantan Selatan tentunya terus berupaya meningkatkan keterlibatan semua pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, utamanya melaksanakan berbagai koordinasi dan mensinergikan kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota IHK maupun non IHK, dan TNI/POLRI serta stakeholder lainnya.

Meskipun inflasi bidang pangan di Kalimantan Selatan relatif stabil, namun tetap perlu kewaspadaan agar tidak mengalami lonjakan harga tinggi. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Selatan perlu meningkatkan intensifikasi pertanian secara luas untuk meningkatkan produktivitas, serta sebagai upaya dalam mendukung program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan rawa (basah) yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan produktif, dan program cetak sawah baru. Hal ini diperlukan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan, dimana saat ini Kalimantan Selatan sebagian

besar masih bergantung dengan provinsi lain dalam pemenuhan pasokan berbagai komoditas bahan pangan (bawang merah, jagung, dll). Selain itu peningkatan akses permodalan bagi petani masih dapat ditingkatkan agar dapat membantu petani dalam upaya peningkatan produktivitas.

Untuk koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus ditingkatkan terutama dalam mendukung pelaksanaan Program Pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dan barang penting, serta program pendukung lainnya melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, dalam rangka menjaga target inflasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dalam PMK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027, yaitu $2,5 \pm 1\%$, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan yang dituangkan dalam arah Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 - 2027 Provinsi Kalimantan Selatan, dimana saat ini dalam penyusunan drafnya mengacu pada visi misi daerah, program prioritas daerah dan RPJMD, serta sinkronisasi program dengan berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan stakeholder terkait lainnya. Sementara itu berdasarkan hasil monitoring di lapangan bahwa dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan baru terdapat 2 (dua) daerah yang telah menetapkan yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Untuk itu penyelesaian penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 - 2027 diharapkan dapat dilakukan pada bulan Agustus 2025 melalui keputusan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Kemudian langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) rutin, dukungan penyelenggaraan Operasi Pasar atau Pasar Murah, Sidak Pasar, serta inovasi budidaya tanaman pangan seperti perluasan implementasi program padi dan hortikultura (cabai, bawang merah), penyaluran penggunaan bibit serta pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Finalisasi penyusunan Roadmap TPID 2025-2027 se-Kalimantan Selatan sebagai arah program pengendalian inflasi 3 Tahun ke depan.
- Merintahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan agar mengoptimalkan penyampaian laporan harian perkembangan harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP serta memperhatikan secara seksama hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan agar dapat mengambil langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah.
- Percepatan dan peningkatan implementasi program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan produksi beras daerah. Sampai bulan Juni 2025 realisasi program Optimalisasi Lahan (OPLAH) seluas 6.248 Ha dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 130 Ha.
- Penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemberdayaan kelompok tani, BUMDes, dan koperasi merah putih melalui skema contract farming dan dukungan akses pembiayaan.

Menyusun kebutuhan bahan pangan MBG secara terencana dan berbasis data serta melibatkan BUMD pangan, BULOG, dan koperasi dalam pemenuhan komoditas untuk MBG guna menjaga kestabilan harga.

- Menjaga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Kalimantan Selatan.
- Membuat surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang Menjaga Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan
- Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pasar secara berkala untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan.
- Memperkuat pengawasan barang kebutuhan pokok dengan stakeholder terkait khususnya Satgas Pangan.
- Mendorong optimalisasi peran BUMD Bangun Banua melalui divisi khusus pangan.